



**Judul** : Pilih ketua dari FKB,KIH tidak konsisten  
**Tanggal** : Selasa, 04 Nopember 2014  
**Surat Kabar** : Pelita  
**Halaman** : 3

## LEGISLATIF

### Pilih Ketua dari PKB, KIH Tidak Konsisten

**Jakarta, Pelita**

Seolah tak kalah dengan DPR "resmi" yang menggelar rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR, Senin pagi, DPR yang dibentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH) juga menggelar rapat BAMUS tandingan. Langkah KIH dinilai tidak konsisten.

"Membahas yang sudah kita paripurna kemarin," kata anggota KIH dari partai NasDem Johny G Plate di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11). Dalam rapat Bamus tandingan yang digelar di ruang rapat Panus A itu, pihaknya juga akan membahas isu-isu terkini di parlemen.

"Dan membahas perkembangan yang terjadi sepanjang *week-end*," katanya. Dalam rapat Bamus itu, DPR tandingan versi KIH memberikan jatah pimpinan secara proporsional kepada fraksi parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Ketua sementara DPR bentukan KIH, Ida Fauziah, mengatakan, keputusan tersebut diambil untuk mengedepankan kebersamaan. Keputusan itu, lanjut dia, berbeda dari sikap KMP yang tak menyisakan kursi sama sekali untuk KIH.

"Kami sepakat menetapkan komposisi pimpinan secara proporsional meskipun yang lain (KMP) tidak hadir bersama kami," kata Ida sesuai memimpin rapat konsultasi KIH di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11).

KIH menggunakan asas proporsionalitas yang ditentukan dari raihan kursi setiap parpol di DPR. Sebagai parpol dengan jumlah kursi terbesar di parlemen, PDI-P meraih paling banyak jatah pimpinan komisi. Sebaliknya, Hanura yang memiliki kursi paling sedikit mendapatkan kursi pimpinan paling sedikit. Semua pimpinan alat kelengkapan Dewan (AKD) di DPR berjumlah 63 terdiri dari 16 ketua dan 47 wakil ketua.

"Saya sendiri sebagai Ketua DPR sementara tidak memaksakan partai saya PKB untuk dapat ketua komisi," kata Ida. Langkah KIH ini menilai tuduhan miring. KIH dinilai tidak berhak memberhentikan pimpinan DPR terpilih. KIH juga dinilai tidak konsisten. Ini terkait dengan penunjukkan Ida Fauziah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai ketua DPR versi KIH.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. "Seharusnya jika mereka mau konsisten, maka ketua DPR versi mereka adalah kader PDIP," katanya, Minggu (2/11).

Menurutnya, pemilihan pimpinan DPR versi KIH tidak konsisten dengan 'isu utama' mereka terhadap UU MD3 sendiri yaitu pemenuhan asas proporsionalitas. Karena selama ini mereka menuntut agar partai pemenang pemilu-lah yang berhak menempatkan kader mereka sebagai ketua DPR, namun kenyataannya mereka memilih Ida Fauziah dari PKB.

Tak hanya itu, mereka juga mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materi UU MD3, dimana status mereka sebagai pemohon. Pada saat MK belum memutuskan perkara tersebut mereka ngotot meminta pemilihan pimpinan DPR harus dilakukan setelah keluarnya putusan MK.

Namun setelah MK mengeluarkan putusan yang menolak permohonannya, mereka pun tetap saja menolak UU MD3. Sehingga KIH dianggap tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk menghormati undang-undang (UU).

"Sepahit apapun isi UU bagi mereka, tetap harus dipatuhi karena acuan resmi kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya. Untuk diketahui, rapat Bamus pengganti yang digelar DPR untuk memasukkan KIH dalam alat kelengkapan dewan. Dalam rapat tersebut DPR juga telah menetapkan mitra komisi di pemerintahan.

Selain itu rapat Bamus yang digelar oleh DPR juga mengusulkan penambahan komisi. Di lain pihak, Koalisi Merah Putih (KMP) sudah mulai melunak untuk mulai melibatkan KIH dalam unsur-unsur pimpinan di parlemen. Namun sejauh ini, belum ada tanggapan positif dari KIH. (cr-02)